

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia salah satunya adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat tidak terkecuali menimbulkan gesekan pertentangan. Pada rentang 2 tahun yang lalu terjadi kesulitan untuk memperoleh hak pemakaman bagi umat non muslim di Bangkalan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dalam mengupayakan kerukunan antar umat beragama.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bangkalan yaitu berupa pembentukan FKUB dimana di bentuk sesuai dengan SK Bupati Bangkalan. Pembentukan FKUB diharapkan untuk menjaga kerukunan di kalangan umat beragama dengan melakukan sosialisasi dan dialog interaktif lintas agama dan menjadi wadah mediasi jika sewaktu-waktu terjadi konflik agama di masa mendatang. Saran untuk pemerintah daerah kabupaten Bangkalan untuk lebih memperhatikan pemakaman umat non muslim karena bagaimanapun lahan pemakaman merupakan salah satu hak beragama bagi manusia yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kerukunan.

ABSTRACT

Human rights are basic rights that are inherent in humans from birth. One of the human rights in national and state life in Indonesia is the right to freedom of religion and belief (KBB). As a nation consisting of many tribes, religions, races and customs, it is no exception that this creates friction and conflict. In the past 2 years there have been difficulties in obtaining burial rights for non-Muslims in Bangkalan. This makes it interesting to examine the policies of the Bangkalan district government in seeking harmony between religious communities.

The research method used is empirical. The approach used is a sociological juridical approach with data collection techniques in the form of interviews and documentation studies.

The results of this research show that the policy implemented by the Bangkalan district government is in the form of the formation of FKUB which was formed in accordance with the Bangkalan Regent's Decree. The formation of FKUB is expected to maintain harmony among religious communities by conducting socialization and interactive dialogue across religions and becoming a mediation forum if at any time religious conflict occurs in the future. Suggestions for the regional government of Bangkalan district to pay more attention to burials of non-Muslims because after all burial grounds are one of the religious rights of humans which must be fulfilled with responsibility by the regional government.

Keywords: Regional Government, Harmony.